



Perception of Merchants and Consumers Towards Payments Using Qris for UMKM in Mataram

Persepsi Pedagang dan Konsumen Terhadap Pembayaran Menggunakan Qris Bagi UMKM di Mataram

Mar'atun Sa'diah

Universitas Islam Negeri Mataram

Correspondence: mariatonsadiyah975@gmail.com

ABSTRACT

The number of QRIS users in West Nusa Tenggara (NTB) has reached 475 thousand, with Mataram City as the region with the largest number of merchants, namely 87,593 merchants. With QRIS, merchants no longer need to provide many QR Codes to serve buyers because with 1 QR Code with the QRIS logo you can read all non-cash payment applications, to simplify QR Code-based non-cash payments. In the era of the Industrial Revolution 4.0, MSMEs must switch to digital so as not to be left behind in terms of payment systems. This research aims to find out, first, the history of Bank Indonesia launching QRIS as a unifying tool for the QR Code Non-Cash Payment System, second, the implementation of QRIS as a driver to realize the vision of the Indonesian Payment System 2025, and third, traders' perceptions of the use of QRIS as a transaction tool for MSMEs in Mataram. The research approach in this study is descriptive qualitative with data collection methods, namely observation, interviews, documentation and literature study. The research results concluded that first, Bank Indonesia launched QRIS on August 17 2019 to simplify QR Code-based non-cash payments. Second, QRIS is one of the initiatives to realize the Indonesian Payment System 2025 and Third, QRIS helps merchants (MSMEs) to make more practical, fast and safe payments and encourages merchants to save part of their income, but according to the results of the author's interview, there are still few people who using non-cash payments and there are still many who don't know what QRIS is.

Keywords: QRIS; Consumer; MSMEs

ABSTRAK

Jumlah pengguna QRIS di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 475 ribu, dengan Kota Mataram sebagai wilayah dengan jumlah merchant terbanyak, yaitu 87.593 merchant. Dengan adanya QRIS ini merchant tidak perlu lagi menyediakan banyak QR Code untuk melayani para pembeli karena dengan 1 QR Code berlogo QRIS dapat membaca semua aplikasi pembayaran non tunai, untuk menyederhanakan pembayaran non tunai berbasis QR Code. Pada era revolusi Industri 4.0 UMKM harus beralih ke digital agar tidak tertinggal salah satunya dalam hal sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, sejarah Bank Indonesia meluncurkan QRIS sebagai alat pemersatu QR Code Sistem Pembayaran Nontunai, kedua, Penerapan QRIS sebagai pendorong untuk mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, dan ketiga Persepsi Pedagang pada penggunaan QRIS sebagai alat transaksi UMKM di mataram. Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada tanggal 17 Agustus 2019 untuk menyederhanakan pembayaran non tunai berbasis QR Code. Kedua, QRIS sebagai salah satu inisiatif untuk mewujudkan Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Ketiga dengan adanya QRIS membantu merchant (UMKM) untuk melakukan pembayaran yang lebih praktis, cepat dan aman serta mendorong merchant untuk menabung sebagian penghasilan mereka namun menurut hasil wawancara penulis masih sedikit masyarakat yang menggunakan pembayaran non tunai dan masih banyak yang belum tau apa itu QRIS.

Kata Kunci : QRIS; Konsumen; UMKM

Received: 10 Dese 2024; Revised: 20 Dese 2024; Accepted: 29 Sept 2024; Available Online: 29 Dese 2024

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Di tengah era revolusi industri 4.0, kita akan menyaksikan banyak perubahan yang akan mempengaruhi berbagai sektor, baik secara langsung maupun tidak. Salah satu sektor yang akan merasakan dampak signifikan adalah dunia usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perubahan yang terjadi akan beragam, dan salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kemunculan Internet of Things (IoT), yang menjadikan penggunaan internet sebagai hal yang krusial dalam operasional suatu bisnis. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro harus mampu beradaptasi dengan dinamika era ini, salah satunya melalui pemanfaatan internet dalam kegiatan usaha mereka (Yunita, 2023).

QRIS hadir sebagai solusi praktis untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam proses digitalisasi. Dengan menggunakan QRIS, pelaku UMKM hanya perlu memanfaatkan smartphone untuk melakukan transaksi secara digital. Sistem QRIS yang bersifat intuitif ini memberikan kemudahan bagi UMKM untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi secara bertahap. Selain itu, sistem ini diatur oleh Bank Indonesia, yang memberikan jaminan kepercayaan kepada para penggunanya.

Agar tetap eksis dan mampu bertahan di era revolusi industri 4.0, bahkan usaha yang berukuran kecil sekalipun harus dapat mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam hal pemanfaatan internet untuk pemasaran. Saat ini, terdapat kecenderungan yang jelas bahwa kebiasaan belanja konsumen beralih dari cara tradisional (offline) ke belanja online (Darnmayanti et al., 2024).

Di Indonesia, UMKM terus tumbuh dan berkembang dengan semakin beragamnya bidang usaha yang dijalankan. Namun, banyak di antara mereka yang belum mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan era revolusi 4.0, yang terlihat dari kurangnya adaptasi terhadap teknologi digital. Masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan sistem komputer, internet, dan aplikasi yang terhubung dengan smartphone dalam operasional mereka. Beberapa di antaranya masih menjalankan usaha secara konvensional, sehingga tidak mampu melakukan efisiensi dalam biaya operasional. UMKM yang tidak dapat melakukan efisiensi ini akan kesulitan bersaing dalam harga jual produk mereka. Selain itu, ketidaktahuan teknologi digital dalam pemasaran membuat UMKM sulit bersaing dengan industri yang sudah mengadopsi teknologi dalam operasional dan pemasaran mereka (Arya et al., 2024).

UMKM juga memegang peranan penting dalam meningkatkan lapangan kerja bagi tenaga kerja produktif. Mereka mampu menyerap tenaga kerja, yang berdampak pada distribusi pendapatan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui munculnya berbagai sektor usaha, UMKM juga memberikan peluang bagi individu yang memiliki imajinasi dan kreativitas untuk berkarya serta membuka usaha sebagai wirausahawan (Jihan R et al., 2024).

Peran UMKM dalam perekonomian nasional sangat signifikan. Pertama, mereka dapat memperkuat perekonomian melalui relasi usaha, yang mencakup fungsi pemasok, produksi, penyaluran, dan pemasaran untuk produk-produk dari industri besar. UMKM berfungsi sebagai penghubung antara berbagai sektor yang saling terkait. Kedua, UMKM berkontribusi pada efisiensi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Mereka sangat fleksibel dan mampu menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, serta melahirkan wirausaha-wirausaha yang tangguh. Ketiga, UMKM berperan dalam pemerataan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat, mengingat jumlah UMKM yang tersebar merata baik di perkotaan maupun pedesaan (Setiawan et al., 2022).

Fakta menunjukkan bahwa UMKM memiliki proporsi yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia, mencapai 99,99% dari total pelaku usaha dengan jumlah unit mencapai 56,54 juta. Usaha Mikro Kecil Menengah telah membuktikan keberadaannya dalam perekonomian Indonesia, terutama saat krisis moneter melanda pada tahun 1998, di mana usaha kecil dan menengah mampu bertahan lebih baik dibandingkan perusahaan besar. Hal ini disebabkan oleh ketidakbergantungan usaha kecil pada modal besar atau pinjaman dalam mata uang asing, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi nilai tukar (Setiawan et al., 2022).

Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan yang menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka. mengidentifikasi beberapa keterbatasan tersebut, seperti akses perbankan yang minim, rendahnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, penggunaan teknologi yang masih terbatas, serta ketidakmampuan untuk mengikuti perubahan selera dan kebutuhan konsumen yang berorientasi ekspor. Akibat pandemi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah melaporkan bahwa UMKM di Indonesia mengalami penurunan omzet, hambatan dalam distribusi, dan kesulitan dalam permodalan (Anidya et al, 2024).

Dengan kemajuan teknologi informasi, gaya hidup masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan, telah mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan perangkat telepon pintar (smartphone) dalam aktivitas sehari-hari mereka. Hal ini terlihat dari kebiasaan orang yang hampir setiap saat menggunakan telepon pintar untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik melalui jaringan seluler maupun media sosial. Hampir semua aspek kehidupan sehari-hari kini tak terlepas dari penggunaan telepon pintar, yang telah terhubung dengan Internet. Aktivitas yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan telepon pintar meliputi berbagai hal, mulai dari menelepon atau mengirim SMS (short message service), berkomunikasi di media sosial, menjalankan bisnis, hingga melakukan transaksi keuangan secara daring.

Kika kita melihat kondisi masyarakat saat ini, terdapat kecenderungan yang lebih besar dalam penggunaan transaksi pembayaran dengan uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh teknologi finansial adalah munculnya konsep masyarakat tanpa uang tunai (cashless society) (Astarina, 2019). Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng telah memanfaatkan layanan teknologi finansial, seperti saluran pembayaran, yang menyediakan layanan elektronik sebagai metode pembayaran. Layanan ini juga memberikan kemudahan dalam memonitor transaksi yang terjadi dalam jual beli. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, UMKM memanfaatkan berbagai layanan keuangan, seperti ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking. Membayar tagihan, membeli pulsa, atau bahkan memeriksa gaji pegawai secara daring telah menjadi praktik umum di kalangan pelaku UMKM (Aryawati et al., 2022).

Kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan di era digital saat ini sudah menjadi hal yang tak terhindarkan. Era global mendorong manusia untuk terus berinovasi dalam menciptakan teknologi yang dapat mempermudah, bahkan menggantikan tugas manusia, termasuk dalam hal transaksi keuangan (Sari et al., 2024). Pertumbuhan alat pembayaran telah mengalami peningkatan yang sangat cepat, seiring dengan perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang terus berlanjut. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non-tunai, baik di dalam negeri maupun secara internasional, telah berkembang pesat, disertai dengan berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kecepatan, dan kenyamanan dalam penggunaannya.

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran adalah munculnya instrumen pembayaran yang dikenal sebagai uang elektronik (*electronic money/e-money*) dan uang virtual (*virtual money*). Uang elektronik hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan akan instrumen pembayaran mikro yang diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran dengan biaya yang relatif rendah. Uang yang disimpan dalam instrumen ini dapat ditempatkan pada media tertentu yang dapat diakses dengan cepat, baik secara offline, aman, dan terjangkau. Selain itu, kemunculan uang elektronik juga didorong oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014, yang mendukung agenda Bank Indonesia untuk mengurangi penggunaan uang tunai di Republik Indonesia dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sedikit menggunakan uang tunai (*less cash society*).

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non-tunai menunjukkan potensi yang besar untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, terutama untuk transaksi bernilai kecil, karena memudahkan dan mengurangi biaya transaksi serta menjamin keamanan dan kecepatan bagi konsumen maupun pedagang.

Dalam laporan mengenai uang elektronik, Bank Sentral Eropa mendefinisikan uang elektronik sebagai sebuah sistem penyimpanan nilai elektronik yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran dalam berbagai keperluan tanpa harus melibatkan rekening bank dalam setiap transaksinya, berfungsi sebagai instrumen prabayar. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, melalui agen penerbit, atau dengan mendebet rekening bank. Nilai uang tersebut dimasukkan ke dalam sistem uang elektronik dan dinyatakan dalam satuan Rupiah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi nilai uang pada media uang elektronik tersebut.

Saat ini, sudah banyak penerbit uang elektronik (*electronic money/e-money*) yang tersedia sebagai alat pembayaran non-tunai di Indonesia, seperti Gopay, OVO, Dana, LinkAja, dan lainnya. Banyaknya aplikasi alat pembayaran non-tunai ini membuat para merchant kesulitan untuk menyediakan berbagai metode pembayaran

yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sebelum adanya QRIS, berbagai jenis kode QR memenuhi meja kasir untuk menyediakan layanan sistem pembayaran non-tunai. Oleh karena itu, pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-74, yaitu 17 Agustus 2019, Bank Indonesia meluncurkan QRIS sebagai solusi untuk menyatukan semua aplikasi pembayaran yang menggunakan QR Code. QRIS merupakan standar kode QR untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking. Tujuan dari adanya QRIS adalah untuk mempermudah pembayaran digital bagi masyarakat dan memungkinkan pengawasan oleh regulator secara terpusat karena telah berstandar (Sekarsari, 2021).

Dengan adanya QRIS, pengguna dapat melakukan transaksi di semua merchant yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Sistem QRIS menggunakan Merchant Presented Mode (MPM), sehingga pengguna aplikasi seperti Gopay, OVO, Dana, dan LinkAja cukup memindai kode QRIS yang ada di merchant tanpa perlu mengganti aplikasi. Hal ini membuat transaksi pembayaran menjadi lebih efisien dan terjangkau, mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, memajukan UMKM, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Darnmayanti et al., 2024).

Menariknya, untuk menyederhanakan proses pembayaran menggunakan QR Code, Bank Indonesia (BI) mulai 1 Januari 2020 mewajibkan semua penyedia layanan pembayaran non tunai untuk mengadopsi sistem QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). QRIS adalah standar QR Code yang digunakan untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking. Penggunaan QR Code telah berkembang ke berbagai sektor, termasuk pasar tradisional. BI mendukung transisi ke transaksi digital dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung. Dalam jangka panjang, diharapkan masyarakat juga akan mengenal berbagai produk keuangan lainnya, seperti asuransi, pinjaman, dan investasi (Anggarini, 2022).

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode kualitatif deskriptif, (Miles, 2014) melibatkan 15-20 pelaku UMKM di Kota Mataram yang dipilih melalui purposive sampling untuk mencerminkan beragam sektor seperti kuliner, kerajinan, dan jasa. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi dan dinamika yang dihadapi oleh pelaku UMKM di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM sangat antusias dengan kehadiran QRIS, karena dengan satu kode QR, mereka dapat menerima semua jenis pembayaran dari berbagai Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) lainnya. Ini berarti mereka hanya perlu menyediakan satu kode QR yang berlogo QRIS untuk melakukan transaksi non-tunai, sehingga tidak perlu lagi repot-repot menyiapkan banyak kode QR dari berbagai PJSP yang sering memenuhi meja kasir mereka. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia, Ferry Warjiyo, memberikan keringanan bagi UMKM dengan membebaskan mereka dari kewajiban membayar Merchant Discount Rate (MDR) hingga 31 September 2020, yang kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2020. Penggunaan QRIS pada tahun 2020 menjadi inovasi yang sangat relevan di tengah situasi pandemi COVID-19, yang mendorong perubahan dalam sistem pembayaran (Aryawati et al., 2022).

Dalam sambutannya secara virtual pada acara Google for Indonesia 2020, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa ekonomi digital memiliki potensi besar untuk berkembang di kalangan UMKM. Dari total 64 juta UMKM, hanya sekitar 13 persen yang telah terintegrasi dalam ekonomi digital. Jika seluruh UMKM dapat terintegrasi, maka pertumbuhan ekonomi digital akan semakin pesat dan berkelanjutan.

Dalam wawancara yang saya lakukan dengan beberapa pelaku UMKM, seperti Ibu Mia yang menjual makanan, ia mengungkapkan bahwa QRIS sangat membantu dalam mempercepat transaksi non-tunai yang lebih mudah, murah, aman, dan dapat diandalkan. Ia juga menyatakan bahwa dengan menggunakan QRIS, sebagian dari penghasilannya dapat ditabung, karena dana dari transaksi non-tunai langsung masuk ke rekening pribadi merchant. Ibu Mia merasa senang karena satu kode QR dari salah satu PJSP berlogo QRIS sudah memungkinkan untuk melayani pembayaran dari berbagai PJSP lainnya. Namun, ia mencatat bahwa masih ada sedikit konsumen

yang melakukan pembayaran non-tunai dan banyak masyarakat di sekitarnya yang belum mengetahui tentang QRIS.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Tina, pemilik rumah makan, yang merasa terbantu dengan adanya QRIS dalam transaksi non-tunai di warungnya. Ia juga merasa senang bisa menabung sebagian dari penghasilannya, tetapi mengakui bahwa masih sedikit orang yang mengetahui tentang metode pembayaran melalui QRIS, sehingga mayoritas pembeli masih memilih untuk membayar secara tunai.

Sejarah Diluncurkannya QRIS oleh Bank Indonesia

Di era digital saat ini, pembayaran elektronik telah menjadi hal yang akrab bagi banyak orang di Indonesia. Contohnya, saat membeli kopi, banyak di antara kita yang telah beralih ke metode pembayaran non-tunai, salah satunya melalui penggunaan QR Code. QR Code merupakan sebuah kode matriks dua dimensi yang terdiri dari tiga pola persegi yang terletak di sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas. Kode ini memiliki modul hitam yang berbentuk persegi, titik, atau piksel, serta mampu menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol. Dengan kata lain, QR Code merupakan sebuah inovasi teknologi yang mempermudah perangkat dalam mentransfer sejumlah data, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan sederhana, terutama dalam konteks pembayaran.

Sebelum Bank Indonesia memperkenalkan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), pembayaran yang menggunakan QR Code harus disesuaikan dengan aplikasi yang dimiliki oleh pengguna. Hal ini menyebabkan satu QR Code hanya dapat dibaca atau dipindai oleh satu aplikasi atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) saja. Akibatnya, merchant harus menyediakan berbagai QR Code untuk memenuhi kebutuhan pembayaran sesuai dengan aplikasi yang digunakan oleh konsumen, sehingga meja kasir menjadi dipenuhi oleh banyak QR Code dan merchant harus menjalin kerja sama dengan berbagai PJSP. PJSP yang lebih kecil berisiko tertinggal dibandingkan dengan PJSP yang telah lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Indonesia meluncurkan standar QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking, yang dikenal dengan sebutan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019 di Jakarta. Implementasi QRIS secara nasional mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020, memberikan waktu transisi bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk mempersiapkan diri. Peluncuran QRIS merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang dicanangkan pada Mei 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa QRIS yang mengusung semangat UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, serta mendukung perkembangan UMKM, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia Maju. Semangat ini sejalan dengan tema HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia yang menekankan pada SDM Unggul untuk kemajuan bangsa.

QRIS UNGGUL memiliki beberapa makna penting. Pertama, sifatnya yang Universal, di mana QRIS dirancang untuk inklusif dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik untuk transaksi di dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, kemudahan atau Gampang, memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan cepat dan aman hanya melalui perangkat ponsel mereka. Ketiga, keuntungan atau Untung, karena transaksi yang dilakukan dengan QRIS memberikan manfaat bagi baik pembeli maupun penjual melalui efisiensi yang dihadirkan oleh satu kode QR yang dapat digunakan di berbagai aplikasi pembayaran. Keempat, sifatnya yang Langsung, transaksi dengan QRIS dapat dilakukan secara instan, mendukung kelancaran proses pembayaran (Sari et al., 2024).

QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan mengadopsi standar internasional EMV. Hal ini bertujuan untuk memperluas interkoneksi sistem pembayaran dan memenuhi kebutuhan spesifik negara, sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara dan instrumen, termasuk antar negara. Tujuan pembentukan QRIS sejalan dengan inisiatif Bank Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur pembayaran ritel yang dapat dilakukan secara real-time, seamless, dan selalu tersedia.

Masyarakat Indonesia umumnya menggunakan uang tunai untuk transaksi bernilai kecil, meskipun penggunaan uang tunai memiliki kendala seperti efisiensi yang rendah dan biaya pengelolaan yang tinggi. Saat

ini, bank sentral di seluruh dunia mendorong penggunaan alat pembayaran non-tunai, mengingat uang tunai memiliki risiko terkait sifat fisiknya, seperti keamanan dan pemalsuan. Alat pembayaran digital menawarkan kelebihan dalam hal keamanan dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. QRIS juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk mencatat arus kas secara real-time, yang secara tidak langsung mendukung pertumbuhan bisnis mereka (Febriyanti & Anshori, 2024).

Penerapan QRIS sebagai pendorong untuk mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Revolusi digital yang terjadi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam perilaku transaksi agen-agen ekonomi. Perilaku konsumsi kini beralih ke belanja melalui platform digital, yang menciptakan permintaan akan metode pembayaran yang bersifat mobile, cepat, dan tetap aman. Hubungan industri di antara para pelaku ekonomi juga mengalami pergeseran menuju pola yang lebih modular, yang pada gilirannya melahirkan model bisnis baru. Platform digital yang beroperasi secara global semakin memudahkan batas-batas yurisdiksi, sehingga mengurangi kedaulatan ekonomi di tingkat nasional.

Tren digitalisasi ini memengaruhi berbagai aspek dalam perekonomian, mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, termasuk di sektor keuangan. Permintaan akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman semakin meningkat seiring dengan munculnya pengalaman baru bagi konsumen yang dimanjakan oleh layanan yang terintegrasi dengan baik. Kolaborasi baru di antara para pelaku ekonomi melalui konsep sharing economy telah mengurangi peran institusi keuangan sebagai perantara. Model bisnis yang baru ini melampaui batasan definisi kegiatan usaha yang selama ini diatur oleh regulasi yang ada. Dalam dunia keuangan, pelaku non-bank yang kurang diatur mulai memasuki layanan keuangan yang sebelumnya didominasi oleh bank. Peran pelaku non-bank ini semakin menguat, mulai dari perusahaan rintisan hingga perusahaan teknologi besar yang beroperasi secara global, seiring dengan pelonggaran hambatan untuk masuk ke pasar.

Tingginya potensi kegagalan pasar dalam sistem pembayaran yang semakin terintegrasi menegaskan pentingnya peran bank sentral. Industri sistem pembayaran cenderung rentan terhadap risiko konsentrasi pasar akibat kombinasi antara skala ekonomi dan efek jaringan. Di sisi lain, penyelesaian pembayaran belum sepenuhnya dilakukan melalui uang bank sentral, yang memiliki unsur finalitas yang kuat. Situasi ini menegaskan pentingnya posisi bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran di era digital, baik dalam kapasitas sebagai regulator, pengawas, maupun operator yang secara aktif mengelola sistem pembayaran. Inovasi teknologi dan perubahan perilaku transaksi masyarakat menuntut bank sentral untuk melakukan reformasi dalam pendekatan kebijakannya. Bank sentral juga harus mampu menjaga kualitas layanan publiknya secara konsisten, sejalan dengan perubahan tuntutan masyarakat di era digital.

Tantangan kebijakan bagi otoritas ekonomi dan keuangan di era digital, khususnya bagi Bank Indonesia, adalah menemukan keseimbangan antara memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh inovasi digital dan mitigasi risiko yang mungkin muncul. Otoritas perlu mengidentifikasi solusi integratif untuk memasukkan 91,3 juta penduduk yang belum memiliki akses ke layanan perbankan dan 62,9 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam sistem ekonomi dan keuangan formal dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi.

Program inklusi keuangan harus diperluas dari sekadar kepemilikan alat pembayaran atau rekening bank menjadi akses penuh ke pasar keuangan dan pasar barang secara berkelanjutan. Bank Indonesia akan memperkenalkan konsep inklusi ekonomi-keuangan yang lebih luas. Peluang untuk menciptakan inklusivitas ini semakin terbuka berkat solusi digital yang fleksibel dan pemanfaatan data serta informasi granular sebagai jejak utama era Industri 4.0. Program transformasi digital yang dijalankan oleh Bank Indonesia sejak awal dirancang secara inklusif, melibatkan pelaku ekonomi kecil dalam arus besar digitalisasi. Transaksi digital akan menghasilkan data yang dapat melahirkan solusi bisnis baru, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi ekonomi.

Visi baru Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 bertujuan untuk menjalin proses transformasi ekonomi Indonesia ke arah digital. Sistem pembayaran yang efisien, bersama dengan sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan yang berfungsi dengan baik, akan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan. Blueprint SPI 2025 akan menjadi kontribusi nyata Bank Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang sehat sekaligus menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari sekadar itu, SPI

2025 akan menjadi pendorong utama reformasi struktural ekonomi Indonesia menuju transformasi digital yang mengintegrasikan seluruh pelaku ekonomi, baik besar maupun kecil, di pusat maupun daerah, ke dalam ekosistem digital yang inklusif.

Untuk meningkatkan adopsi QRIS di kalangan UMKM, beberapa strategi utama yang dapat diterapkan mencakup edukasi digital dan pemberian insentif bagi merchant. Edukasi digital dapat dilakukan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, seperti cara menggunakan QRIS, manfaatnya untuk efisiensi operasional, serta peningkatan literasi digital. Pelatihan ini dapat melibatkan komunitas lokal, asosiasi UMKM, serta lembaga keuangan seperti bank atau fintech untuk mempercepat pemahaman teknologi. Selain itu, memberikan insentif bagi merchant melalui penghapusan atau pengurangan biaya layanan selama periode tertentu dapat menjadi daya tarik. Insentif lain, seperti pemberian voucher transaksi atau hadiah untuk merchant dengan kinerja transaksi terbaik, juga efektif dalam meningkatkan motivasi penggunaan QRIS. Kerja sama antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia diperlukan untuk memperluas akses QRIS ke daerah-daerah terpencil, mendukung penyediaan infrastruktur, serta memastikan layanan QRIS tetap andal dan mudah diakses. Strategi ini diharapkan tidak hanya memperluas penggunaan QRIS tetapi juga mempercepat transformasi digital UMKM secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia meluncurkan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) pada 17 Agustus 2019 sebagai bagian dari Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025). Inovasi ini mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran QR Code menjadi satu sistem terpadu, sehingga merchant cukup menggunakan satu QR Code untuk semua jenis pembayaran non-tunai. Sebelumnya, merchant harus menyediakan multiple QR Code dari setiap Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk melayani pembayaran sesuai aplikasi yang dimiliki pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan merchant, QRIS memberikan manfaat seperti mendorong kebiasaan menabung karena transaksi langsung masuk ke rekening dan kemudahan bertransaksi tanpa perlu menyediakan uang kembalian. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya penggunaan pembayaran non-tunai oleh pembeli dan kurangnya pemahaman merchant bahwa satu QR Code QRIS dapat dibaca oleh semua aplikasi pembayaran yang berizin dari Bank Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa QRIS berpotensi menjadi katalis utama dalam mempercepat digitalisasi UMKM, meskipun masih menghadapi tantangan seperti literasi digital yang rendah dan akses teknologi yang terbatas. Dengan dukungan berkelanjutan dari Bank Indonesia dan pemerintah daerah, QRIS dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital dengan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan mendorong inklusi keuangan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Daftar Pustaka

- Anggarini, D. T. (2022). Application of Quick Response Code Indonesian as a Payment Tool in Digitizing MSMEs. *SENTRALISASI*, 11(1), 1-14. <https://doi.org/10.33506/sl.v11i1.1504>
- Anidya Iلمي Febriyanti, & Mochammad Isa Anshori. (2024). Using the Qris Bri Mobile Payment Method to Increase Profitability of MSMEs. *Indonesian Journal of Entrepreneurship and Startups*, 2(2), 75-86. <https://doi.org/10.55927/ijes.v2i2.10224>
- Anis, Ratna, Sari., Aishwarya, Shafa, Zahirah., Nonny, Laurencia, Nawangsari., Erminah, Dwi, Ambarwati., M., Aziz. (2023). Sosialisasi Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran pada UMKM Mie Ayam Mama Elz. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, doi: 10.33795/abdimas.v10i1.4237
- Arya Budi Saputra, Adam Hermawan, & Syti Sarah Maesaroh. (2024). Analisis dan Rekomendasi Upaya Penerapan Penggunaan QRIS Bagi Pedagang di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya. *Jurnal Transformasi Bisnis Digital*, 1(5), 41-58. <https://doi.org/10.61132/jutrabidi.v1i5.310>
- Aryawati, N. P. A., Mahardika, I. M. N. O., & Wibawa, I. G. J. S. (2022). Persepsi Pengguna QRIS Pada UMKM Di Kota Mataram. *Guna Sewaka*, 1(2), 35-44. <https://doi.org/10.53977/jgs.v1i2.668>
- Darnmayanti, N., Maaidah, E. P. S., Rosyida, I. A., Abdullah, A. R., & Hartono. (2024). Analysis Usefulness Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) For Efficiency And Accountability Of MSMEs Financial Statements. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 12(1).

<https://doi.org/10.17687/jeb.v12i1.1182>

- Heri, Yanto., Budi, Prasetyo., Niswah, Baroroh., Ain, Hajawiyah., Kardiyem, Kardiyem. (2024). Optimalisasi Literasi Keuangan Digital Melalui Peningkatan Penggunaan QRIS Pada UMKM. Surya Abdimas, doi: 10.37729/abdimas.v8i3.4909
- Jihan Rahmawati, Sri Murtini, Rani Raharjanti, & Prima Ayundyayasti. (2024). QRIS: Factors Influencing Interest in Adoption by MSMEs in Semarang Regency. Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i2.170>
- Miles, H. & S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. sage publications.
- Mohammad, Alsha'Rat. (2022). APPLICATION OF QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN) as a PAYMENT TOOL IN DIGITIZING MSMEs. Jurnal ilmiah manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset), doi: 10.32529/jim.v6i2.1288
- Ni, Putu, Ari, Aryawati., I, Made, Sriundy, Mahardika., I, Gede, Andika, S, Wibawa. (2022). Persepsi Pengguna QRIS Pada UMKM Di Kota Mataram. Guna Sewaka, doi: 10.53977/jgs.v1i2.668
- Sari, B. N., Chaidir, T., & Yudha, I. D. K. (2024). Analisis Pengaruh Kemudahan dan Kemanfaatan Terhadap Minat dan Perilaku Menggunakan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada Usaha Kuliner di Kota Mataram. JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA, 10(3), 455-462. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.616>
- Setiawan, B., Khairani, M., Fadil, T., & Abdullah, T. Mohd. K. (2022). Investigasi Behavioral Intention pada Sistem Pembayaran QRIS di Merchant UMKM. JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi), 9(4), 3467-3480. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i4.3364>
- Putri, Putri, Jayanti., Nabila, Yeva, Putri., Sofia, Nur, Madina. (2024). Penggunaan QRIS Oleh UMKM Sebagai Praktik Usaha Dengan Gaya Hidup Cashless Di Era Digitalisasi. Deleted Journal, doi: 10.62504/jimr491
- Riani, Budiarsih., Hartono, Sony. (2022). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), doi: 10.31092/jpi.v6i1.1549
- Rangga, Bayu, Kresna., Nugroho, SBM. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan dan Technology Acceptance Model (Tam) Terhadap Minat Penggunaan Quick Response Indonesian Standar (QRIS) pada Pelaku UMKM di Kecamatan Temanggung. Diponegoro Journal of Economics, doi: 10.14710/djoe.34509
- Yunita, A. (2023). The Use of QRIS in MSMEs in Cilegon City. Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN), 3(1), 01-07. <https://doi.org/10.30656/jkk.v3i1.7926>